

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu membuat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa pengelolaan arsip dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ditingkatkan keamanannya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk kemudahan akses arsip bagi publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pasal 2

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengamanan dan hak akses arsip dinamis.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. biasa; dan
 - b. terbatas.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilakukan dengan:

1. memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang termuat dalam arsip dinamis disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; dan
2. harus dituangkan dalam suatu ketetapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi.

Pasal 5

Ketentuan atas pelaksanaan akses atas arsip dinamis yaitu:

1. hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
2. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
3. pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1818

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. SUBTANTIF

| No | Kode Klasifikasi | Jenis Arsip | Klasifikasi Keamanan | Hak Akses | Dasar Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---|
| 1. | PG | PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) | | | | |
| | PG.01 | Kebijakan Bidang PUG | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang Kesetaraan Gender |
| | PG.02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang PUG | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang Kesetaraan Gender |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----------|------------|--|---|
| | PG.03 | Advokasi Pelaksanaan PUG | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang Kesetaraan Gender |
| | PG.04 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang PUG | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang Kesetaraan Gender |
| | PG.05 | Pemantauan dan Evaluasi PUG | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang Kesetaraan Gender |
| 2. | PP | PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN | | | | |
| | PP 01 | Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.03 | Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.04 | Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.05 | Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----------|------------|--|---|
| | PP.06 | Advokasi Perlindungan Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.06.01 | Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.06.02 | Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.06.03 | Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.07 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| | PP.08 | Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang perlindungan hak Perempuan |
| 3. | PA | PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| | PA.01 | Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |

| | | | | | |
|----------|---|----------|------------|--|---|
| PA.01.01 | Kebijakan Perlindungan Anak | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.01.02 | Kebijakan Tumbuh Kembang Anak | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.02.01 | Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.02.02 | Sosialisasi Kebijakan Tumbuh Kembang Anak | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.03 | Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.03.01 | Advokasi Bidang Perlindungan Anak (PA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.03.02 | Advokasi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| PA.04 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----------|------------|--|---|
| | PA.05 | Pemantauan dan Evaluasi PA dan TKA | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PA dan TKA |
| | PA.06 | Pemetaan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi PA dan TKA |
| 4. | PM | PARTISIPASI MASYARAKAT | | | | |
| | PM.01 | Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat (PM) | Terbatas | Eselon III | | Eselon II pada Deputi bidang PM |
| | PM.02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PM |
| | PM.03 | Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PM |
| | PM.04 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PM |
| | PM.05 | Pemantauan dan Evaluasi Bidang Partisipasi Masyarakat | Biasa | Eselon IV | | Eselon II pada Deputi bidang PM |
| 5. | SA | KAJIAN TENTANG PP DAN PA | | | | |
| | SA .01 | Telaah dan Kajian | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |
| | SA .01.01 | Bidang Pembangunan Keluarga | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|-----------|--|-------------------------------|
| SA .01.02 | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |
| SA .01.03 | Bidang Penanggulangan Kemiskinan | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |
| SA .01.04 | Bidang Komunikasi Pembangunan | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |
| SA .02 | Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan | Biasa | Eselon IV | | Unit Eselon II pada Biro Umum |

B. FASILITATIF

| No | Kode Klasifikasi | Jenis Arsip | Klasifikasi Keamanan | Hak Akses | Dasar Pertimbangan | Unit Pengolah |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1. | KP | KEPEGAWAIAN | | | | |
| | KP.01 | Formasi Pegawai | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | | Perencanaan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | | Pengadaan calon pegawai | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | | Pengumpulan bahan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------|---|--------------------------|
| | penyusunan rencana formasi | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | Rencana penempatan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | Penetapan klasifikasi pendidikan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | Persetujuan formasi | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02 | Pengadaan Pegawai | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02.01 | Penerimaan Pegawai | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02.02 | Pengangkatan CPNS/PNS | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02.03 | Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02.04 | Pengadaan Pegawai tidak tetap (PTT) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.02.05 | Prajabatan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---|--------------------------|
| KP.02.06 | Penempatan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03 | Mutasi Pegawai | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.01 | Kenaikan pangkat/golongan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.02 | Kenaikan gaji berkala | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.03 | Penyesuaian masa kerja | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.04 | Penyesuaian tunjangan keluarga | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.05 | Promosi | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.06 | Mutasi dalam Jabatan struktural | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.03.07 | Alih tugas | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.04 | Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan | Terbatas | Eselon II | - | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------|---|--------------------------|
| KP.04.01 | Pengangkatan jabatan | Terbatas | Eselon II | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.04.02 | Pemberhentian jabatan | Terbatas | Eselon II | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.05 | Pendelegasian wewenang | | | | |
| KP.05.01 | Pelaksana Tugas (Plt) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.05.02 | Pelaksana Harian (Plh) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.06 | Pendidikan dan Latihan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.06.01 | Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.06.02 | Kursus/Diklat Fungsional | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.06.03 | Kursus/Diklat Teknis | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07 | Administrasi Pegawai | | | - | |
| KP.07.01 | Data/Keterangan Pegawai | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|---|--------------------------|
| KP.07.02 | Data/Keterangan Menteri | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.03 | Kartu Pegawai | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.04 | Kartu Isteri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.05 | Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.06 | Kartu Asuransi Kesehatan (Askes)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.07 | Tanda Jasa | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.07.08 | <i>Assesment</i> Pegawai | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.08 | Pengembangan Pegawai | | | | |
| KP.08.01 | Program Sarjana (S1) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.08.02 | Program Pasca Sarjana (S2) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.08.03 | Program Doktor (S3) | Biasa | Eselon IV | - | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|---------------|---|----------|-----------|--|--------------------------|
| KP.09 | Pembinaan Pegawai | | | | |
| KP.09.01 | Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.09.02 | Pembinaan Rohani | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.09.03 | Hukuman Disiplin | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP. 10 | Pembinaan Jabatan Fungsional | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.01 | Jabatan Fungsional Analis | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.02 | Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.03 | Jabatan Fungsional Auditor | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.04 | Jabatan Fungsional Pustakawan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.05 | Jabatan Fungsional Pranata Komputer | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.06 | Jabatan Fungsional Pranata Humas | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|--|--------------------------|
| KP.10.07 | Jabatan Fungsional Arsiparis | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.10.08 | Jabatan Fungsional Lainnya | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11 | Kesejahteraan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11.01 | Kesehatan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11.02 | Cuti | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11.03 | Rekreasi/Kesenian/Olah Raga | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11.04 | Bantuan Sosial | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.11.05 | Perumahan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP 12 | Pemberhentian Pegawai | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KP.12.01 | Dengan hormat | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------|-----------|--|--------------------------|
| | KP.12.02 | Tidak dengan hormat | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP 13 | Organisasi NonKedinasan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP.13.01 | Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP.13.02 | Dharma Wanita Persatuan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP.13.03 | Koperasi | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP.13.04 | Lain-lain | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KP. 14 | Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| 2. | KU | KEUANGAN | | | | |
| | KU.01 | Pelaksanaan Anggaran | | | | |
| | KU.01.01 | DIPA/POK dan revisinya | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.01.02 | Rencana Anggaran Belanja (RAB) | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----------|------------|--|--------------------------|
| | KU.01.03 | Penggajian | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.01.04 | Pengeluaran Anggaran | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02 | Pengelolaan Perbendaharaan | | | | |
| | KU.02.01 | Perbendaharaan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.02 | Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.03 | Kartu Pengawas Kredit Anggaran | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.04 | Pajak | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.05 | Penerimaan non pajak | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.06 | Pengembalian belanja | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.07 | Berita Acara Pemeriksaan Kas | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | KU.02.08 | Verifikasi Anggaran | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|--|--------------------------|
| KU.02.09 | Pembukuan Anggaran | Terbatas | Eselon III | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.03 | Ketatausahaan Keuangan | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.03.01 | Keterangan Penghasilan | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.03.02 | Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.03.03 | Permohonan Pinjaman | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.03.04 | Iuran Keanggotaan Organisasi | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.05 | Akuntansi dan pelaporan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.05.01 | Laporan realisasi dari masing-masing Satuan Kerja | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.05.02 | Dokumen akuntansi keuangan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| KU.05.03 | Laporan Keuangan tahunan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----------|-----------|--|--------------------------|
| | KU.06 | Hibah Luar Negeri | Terbatas | Eselon II | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | | | | | | |
| 3. | RT | KERUMAHTANGGAAN | | | | |
| | RT.01 | Fasilitas | | | | |
| | RT.01.01 | Pengelolaan Kendaraan Dinas | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | RT.01.02 | Ruang Rapat/Konsumsi | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | RT.01.03 | Telekomunikasi, Listrik, Air, dan Jaringan Internet | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | RT.02 | Pengamanan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | RT.03 | Surat Jalan/Surat Perintah Membawa/Surat Meminjam Barang Milik Negara | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | RT.04 | Kebersihan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------|--|--------------------------|
| PL | PERLENGKAPAN | | | | |
| PL.01 | Analisis Kebutuhan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.02 | Tata Ruang | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.03 | Daftar perkenalan mampu | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.04 | Pengadaan Barang Jasa | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.04.01 | Lelang | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.04.02 | Seleksi | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.05 | Penggunaan | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.06 | Pemindahtangan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.07 | Pergudangan | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| PL.08 | Distribusi | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----------|-----------|--|--------------------------|
| | PL.09 | Pemeliharaan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | PL.10 | Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) | Terbatas | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | PL.11 | Penghapusan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| 5. | TU | TATA USAHA | | | | |
| | TU.01 | Persuratan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02 | Kearsipan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02.01 | Pembinaan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02.02 | Pemindahan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02.03 | Pemusnahan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02.04 | Penyerahan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | TU.02.05 | Pengawasan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|--|----------------------------------|
| | TU. 03 | Rapat | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| 6. | OT | ORGANISASI DAN TATALAKSANA | | | | |
| | OT.01 | Organisasi | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | OT.02 | Uraian tugas | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | OT.03 | Analisis Jabatan dan beban kerja | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | OT.04 | Mekanisme kerja | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| | OT.05 | Ketatalaksanaan | Biasa | Eselon IV | | Es II. Biro Umum dan SDM |
| 7. | PR | PERENCANAAN | | | | |
| | PR.01 | Penyusunan Program | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | PR.02 | Penyusunan Anggaran | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | PR.03 | Revisi dokumen Anggaran | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |

| | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|--|----------------------------------|
| PR.04 | Pokok-pokok Kebijakan dan strategis pembangunan | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.01.01 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.01.02 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.01.03 | Rencana Strategis (Renstra) Kemen PPPA | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.05 | Rencana Kerja Tahunan | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.06 | Penetapan Kinerja | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.07 | Evaluasi dan Laporan | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.07.01 | Evaluasi Kegiatan | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.07.02 | Laporan Berkala | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| PR.07.03 | Laporan khusus | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|-------|-----------|--|----------------------------------|
| | PR.07.04 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| 8. | DI | DATA DAN INFORMASI | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | DI.01 | Data Gender | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | DI.02 | Data Anak | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | DI.03 | Dokumen <i>hosting</i> | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| 9. | KL | KERJASAMA ANTAR LEMBAGA | | | | |
| | KL.01 | Kerjasama dalam negeri | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| | KL.02 | Kerjasama luar negeri | Biasa | Eselon IV | | Es. II Biro Perencanaan dan Data |
| 10. | HM | HUUBUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| | HM.01 | Penerangan dan publikasi | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HM.02 | Peliputan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |

| | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|--|-----------------------------|
| HM.03 | Hubungan Antar Lembaga Forum Koordinasi Kehumasan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.04 | Pemberian Informasi kepada Masyarakat | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.05 | Dokumentasi dan Penerbitan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.06 | Keprotokolan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.06.01 | Upacara/Acara Kedinasan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.06.02 | Kunjungan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.06.03 | Agenda Pimpinan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.07 | Penghargaan | Terbatas | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.08 | Ucapan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| HM.09 | Pemantauan Media | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|-------|-----------|--|-----------------------------|
| | HM.10 | Kepustakaan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HM.10.01 | Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HM.10.02 | Penyimpanan Bahan Pustaka | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HM.10.03 | Pelayanan Kepustakaan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| 11. | HK | HUKUM | | | | |
| | HK.01 | Program Legislasi | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.02 | Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.03 | Produk Hukum | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.03.01 | Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.03.02 | Produk Hukum yang Bersifat Penetapan | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.03.03 | Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|----------|------------|--|-----------------------------|
| | HK.04 | Bantuan Hukum | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.05 | Analisis Hukum | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.06 | Pertimbangan Hukum | Terbatas | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | HK.07 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| 12. | DM | PENGADUAN MASYRAKAT | | | | |
| | DM.01 | Permasalahan Perempuan dan Anak | Terbatas | Eselon III | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | DM.02 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Terbatas | Eselon III | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| | DM.03 | Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak | Biasa | Eselon IV | | Es.II. Biro Hukum dan Humas |
| 13. | PW | PENGAWASAN | | | | |
| | PW.01 | Audit | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| | PW.02 | Reviu | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| | PW.03 | Evaluasi | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| | PW.04 | Sistem Pengendalian Internal (SPI) | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| | PW.05 | Laporan Hasil Pengawasan | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |

| | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|
| PW.06 | Pemantauan | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.06.01 | Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.06.02 | Pemantauan terhadap Kerugian Negara | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.06.03 | Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.06.04 | Penerapan <i>Early Warning System</i> | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.06.05 | Pemantauan Disiplin Pegawai | Terbatas | Eselon II | | Es. II. Inspektorat |
| PW.07 | Kegiatan Pengawasan Lainnya | Biasa | Eselon IV | | Es. II. Inspektorat |

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE